



**ANALISIS PERAN BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA MULYOREJO KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO**

TESIS

OLEH:

MOCH. DZULFIKAR FIRSTIAN RAHMATUL AKBAR

NPM: 22302091020



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

2025

ABSTRAK

Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Akbar, Analisis Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Dosen Pembimbing II : Dr. Sunariyanto., S.Sos., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi BUMDes, menganalisis peranan BUMDes dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BUMDes. Sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. **viii** | Page

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dan jenis pendekatan deskriptif. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes Mulyorejo telah didirikan dengan bukti normatif dan empiris seperti telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) struktur kelembagaan dan pembagian unit usaha. Peranan pemberdayaan yang dilakukan mencakup pembuatan saluran pengairan, pembaruan aturan sistem panen satu pintu dan pembelian unit aset mobil. Faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya inkonsistensi dari pemerintah desa, rendahnya tingkat literasi masyarakat, inkompetensi pengurus, serta dampak dari pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk mengembangkan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan yang berkelanjutan, dengan catatan adanya peningkatan kapasitas SDM, konsistensi kebijakan, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra eksternal. BUMDes diharapkan dapat menjadi pilar ekonomi desa yang inklusif dan mandiri di masa mendatang.

Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDes, Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

Moch. Dzulfikar Firstian Rahmatul Akbar, Analysis of the Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the Economic Empowerment of the Community of Mulyorejo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. Supervisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Supervisor II: Dr. Sunariyanto., S.Sos., M.M.

This study aims to determine the existence of BUMDes, analyze its role, and identify factors influencing the economic empowerment of the community. As a village economic institution, it is expected to be a driving force in improving community welfare by utilizing local potential.

The research approach used was qualitative and descriptive. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the existence of BUMDes Mulyorejo has been established, supported by normative and empirical evidence, such as the issuance of a Decree (SK) on the institutional structure and division of business units. The empowerment role undertaken includes the construction of irrigation channels, updating regulations on the one-stop harvesting system, and the purchase of a car asset unit. Influencing factors include inconsistency on the part of the village government, low levels of community literacy, incompetence of administrators, and the impact of the COVID-19 pandemic.

Nevertheless, there is significant opportunity to develop BUMDes as a sustainable empowerment institution, with the focus on improving human resource capacity, policy consistency, and strengthening collaboration between the village government, the community, and external partners. BUMDes is expected to become a pillar of an inclusive and independent village economy in the future.

Keyword : Empowerment, BUMDes, Community Economy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas sebagaimana dicantumkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004 yang terbentuk Undang-Undang. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK).

Di Indonesia urusan penanggulangan kemiskinan telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal berikut. Pasal 27 ayat 2: “tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; pasal 28 B ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih jauh ditegaskan pada pasal 28 C ayat 1, yaitu: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, pasal 28 D ayat 2: “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28 H (ayat 1-4) berturut-turut menegaskan soal jaminan hak hidup dan sejahtera bagi warga negara. Ayat 1 adalah “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat 3 berbunyi: “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda

secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Chapra, 2001: 102).

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Naqvi, 2003: 136).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991: 482).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori miskin (*the absolut poor*). Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikan dengan kata “kemiskinan”. Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi.

Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa mendatang. Dan kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan. Bradshaw (2005) menjelaskan ada 5 penjelasan mengapa kemiskina timbul. 1) kelemahan-kelemahan individual (*individual deficiencies*), 2) sistem budaya yang mendukung subkultural kemiskinan, 3) Distorsi-distorsi ekonomi politik atau diskriminasi sosial-ekonomi, 4) kesenjangan kewilayahan, dan 5) asal-usul lingkungan yang bersifat kumulatif.

Masalah yang menyebabkan kurang berhasilnya program pemberdayaan masyarakat yaitu intervensi atau campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam program pemberdayaan masyarakat, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Kemudian faktor lainya yaitu “fokus” perhatian terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada belum secara sungguh-sungguh melalui program antar sektor yang saling terintegrasi satu sama lain. Pengembangan BUMDes melalui *One Village One Product* sangat memerlukan dukungan pemerintah, stakeholder, dan sumber daya manusia yang baik agar dapat menciptakan produk unggulan yang berkualitas. (Sandi W., Slamet M., Septiana: 2023)

Saat ini pemerintah daerah tengah mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Istilah BUMDesa muncul pertama kali melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 tentang pemerintahan desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat desa. Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa merupakan payung hukum otonomi desa, yang merupakan kewenangan Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa ada intervensi pihak luar. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Desa juga mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan ke-luasan kepala daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus diadakan pengawasan yang kuat. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli daerah dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi. (Trina, Slamet S., Roni : 2020)

Sejalan dengan itu, sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-Undang desa disebutkan bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai lembaga usaha desa, BUMDesa dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja membawa peluang besar bagi BUMDesa. BUMDesa berada dalam bagian kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum atas bentuk badan usaha BUMDesa. Pada Pasal 117 Undang-Undang Cipta kerja secara tegas mengganti definisi BUMDesa menjadi, “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan /atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Peranan BUMDesa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat berfungsi untuk menstimulasi, memfasilitasi dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat

pedesaan. Bila bercermin pada peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka BUMDesa ini diharapkan menjadi revitalisasi peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian keberadaan BUMDesa sangat strategis, dimana sebagai lembaga milik ekonomi desa akan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pedapatan asli desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui prakarsa lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara mandiri. Maka dari itu di perlukan suatu inovasi baru seperti mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. (Subaidi, Slamet M., Khoiron : 2019)

Dalam pendirian BUMDesa perlu memperhatikan beberapa prinsip berbasis lokal, partisipasi, pemberdayaan, berpihak kepada masyarakat, demokrasi, akuntabel, keberagaman. Saat ini di Jawa Timur telah terbentuk sekitar 6.583 lebih BUMDesa yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, dan jumlah angka tersebut akan terus meningkat seiring perkembangan zaman. Khususnya di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat 393 desa yang telah memiliki BUMDesa dari 419 desa yang ada Kabupaten Bojonegoro, yang terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut, kategori maju ada 15 desa (yang sudah menyumbang PAD untuk desa), kategori berkembang ada 64 desa, kategori baru tumbuh ada 173 desa, dan kategori dasar sebanyak 161 desa, dan sisanya 26 desa masih belum memiliki BUMDesa.

Berikut merupakan data jumlah perkembangan BUMDesa Kabupaten Bojonegoro tahun 2021

Tabel I.1 Klasifikasi jumlah BUMDesa Kabupaten Bojonegoro

No	Kategori	Jumlah
1	Maju	15
2	Berkembang	64
3	Baru tumbuh	173
4	Dasar	161
5	Belum memiliki	26
Jumlah		419

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tahun 2021

Setiap BUMDesa di Kabupaten Bojonegoro masih ada kluster lagi sesuai dengan menjadi beberapa bagian seperti :

- Usaha sehat
- Usaha sangat sehat
- Usaha tidak sehat
- Usaha tidak hidup, tidak mati

Dari pembagian seperti dicantumkan data diatas sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro memiliki BUMDesa, namun pada dasarnya masih sedikit yang bisa menyumbang PAD untuk desa masing-masing, dari keseluruhan tersebut hanya 15 desa yang dapat menyumbang PAD pertahun untuk desa. Adanya sumbangan PAD dari sektor BUMDesa ini memberikan dampak untuk pertumbuhan desa, seperti pertumbuhan sosial masyarakat, ekonomi dan pembangunan desa, dan masih banyak BUMDesa yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih belum ada perkembangan sama sekali atau kata lain masih stak dan belum bisa berkembang.

Pengaruh adanya BUMDesa terhadap perkembangan desa sebagai bentuk pemberdayaan dari Pemerintah Pusat yang di Amanahkan ke desa untuk masyarakat agar setiap masyarakat desa bisa berdaya dan dapat bersaing dalam segi sosial, pembangunan terutama di bidang ekonomi. Di Desa Mulyorejo sendiri masih bisa dikategorikan sebagai BUMDesa dasar, karena BUMDesa yang ada di Desa Mulyorejo sendiri masih memiliki satu cabang usaha yang dimiliki desa masih aktif sampai sekarang, salah satu badan usaha

milik desa yang masih berjalan adalah kelompok tani (AREAL), kelompok tani ini adalah salah satu cabang BUMDesa yang bergerak di sektor pertanian, lebih lengkapnya bergerak pada system pengairan area persawahan.

Kelompok tani (AREAL) ini juga masih dipegang oleh pihak swasta dengan keterangan bahwa pihak pemerintahan Desa Mulyorejo bekerja sama dengan investor swasta untuk menjalankan BUMDesa ini, dan untuk cabang usaha lain yang ada di Desa Bojonegoro juga masih pasif, atau juga bisa dibilang masih stak pada kondisi yang sama. Padahal di Desa Mulyorejo ini banyak Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain pada sektor utama pertanian tadi, Sumber Daya Manusia yang banyak juga belum termanfaatkan dengan baik dengan adanya BUMDesa ini.

Selain kelompok tani (AREAL) yang ada di Desa Mulyorejo ini, masih ada beberapa potensi lain yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Desa Mulyorejo melalui BUMDes. Mulai dari potensi dari Sumber Daya Alam yang bisa dibilang masih belum bisa di manfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Desa Mulyorejo, Sumber Daya Alam yang dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat, mulai dari pemerataan ekonomi sampai pemerataan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyorejo yang memiliki potensi lebih dari satu cabang usaha menunjukkan kapasitas kelembagaan yang cukup besar dalam mendukung pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya yang menyatakan bahwa kurang maksimalnya peranan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dikarenakan faktor intervensi dari pemerintah desa, kurang maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga BUMDes Mulyorejo ini adalah karena beberapa faktor utama seperti minimnya literasi masyarakat desa, inkopetensi pengurus BUMDes serta perangkat desa.

Minimnya tingkat literasi yang menjadi faktor utama memberikan beberapa dampak signifikan terhadap proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyorejo. Salah satu dampak yang paling nyata adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program-program BUMDes, karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan, manfaat, dan mekanisme program tersebut. Selain itu, masyarakat cenderung pasif dalam mengambil inisiatif ekonomi maupun sosial karena terbatasnya pengetahuan dan

keterampilan yang mereka miliki. Minimnya literasi juga berdampak pada lemahnya pengawasan sosial terhadap jalannya lembaga desa, termasuk BUMDes, sehingga membuka celah bagi ketidakefektifan tata kelola.

Kurang di perhatikannya potensi yang ada, menjadikan pemerataan ekonomi dan sosial masyarakat Desa Mulyorejo terhambat, selain itu juga Sumber Daya Manusia yang kurang akan kesadaran ekonomi juga menjadi salah satu hambatan. Tingkat kesadaran ekonomi masyarakat yang kurang di sebabkan karena masih kentalnya aroma feodalisme dan politik yang mempengaruhi masyarakat setempat.

Harapan peneliti dari sedikit paparan permasalahan di atas, peneliti berharap dari penelitian yang di lakukan dapat menjadi acuan dan pedoman, dengan memberikan solusi dan alternatif dari beberapa hambatan yang telah di jelaskan di atas, harapan penulis supaya Desa Mulyorejo dapat menjadi desa yang mandiri dan produktif serta tingkat kesadaran ekonomi meningkat.

Memperhatikan pasif nya implementasi BUMDesa yang ada di Desa Mulyorejo ini, dengan masih banyaknya cabang usaha BUMDesa yang masih belum termanfaatkan dengan baik sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan memberi judul **“ANALISIS PERAN BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MULYOREJO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi BUMDesa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran BUMDesa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDesa?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat bermanfaat dalam memberikan batasan mengenai obyek penelitian yang sedang dikaji. Hal ini sangat berguna bagi peneliti supaya tidak terjebak kedalam banyaknya data yang telah diperoleh ketika di lapangan. Penentuan fokus penelitian ini dapat diarahkan kepada pembaruan informasi yang dapat diperoleh, (Sugiyono 2017: 207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi :

1. Eksistensi BUMDes Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro
2. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro
3. Faktor yang mendukung dan faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui eksistensi BUMDes Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis peranan BUMDesa Mulyorejo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Mulyorejo.
3. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terkendalanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program BUMDesa di Desa Mulyorejo.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi peneliti penanggulangan kemiskinan yang sedang terjadi di masyarakat bisa diatasi melalui pemberdayaan masyarakat pada tingkat yang paling kecil, yaitu terhadap masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas sebagaimana

dicantumkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004 yang terbentuk Undang-Undang. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK).

Penanggulangan kemiskinan pada tingkat bawah, yaitu pada tingkat desa bisa ditangani melalui Lembaga yang dinaungi oleh pemerintah desa yang biasa disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Peneliti memberikan asumsi melalui BUMDes ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, sama seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha ini akan menumbuhkan rasa kemandirian terhadap masyarakat untuk mengelola perekonomian secara mandiri. Dengan tumbuhnya rasa kemandirian tersebut, masyarakat Desa Mulyorejo diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan atau intervensi dari pihak luar, melainkan mampu menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam unit-unit usaha BUMDes, masyarakat dapat memperoleh keterampilan, akses permodalan, serta peluang kerja yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Sesuai dengan Indonesia yang menganut negara hukum, peneliti melakukan penelitian pada lembaga yang mempunyai payung hukum yang jelas seperti BUMDes ini sebagai latar penelitian karena keberadaan BUMDes telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga resmi yang diakui negara, BUMDes memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan kultural di tingkat desa. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa BUMDes merupakan entitas yang tepat untuk dikaji dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Selain itu, melalui analisis terhadap implementasi BUMDes, peneliti dapat melihat sejauh mana regulasi negara dapat dioperasionalkan secara nyata di tingkat lokal, serta bagaimana interaksi antara kebijakan, kelembagaan, dan masyarakat terjadi dalam praktiknya. Hal ini menjadikan BUMDes sebagai objek penelitian yang strategis untuk memahami dinamika pembangunan desa dalam kerangka negara hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Akademik

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu tentang administrasi publik khususnya dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa. Serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BUMDesa.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Melalui Program BUMDesa (studi pada BUMDesa Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).

1.6.3 Manfaat praktis

Penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintahan Desa Mulyorejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program BUMDesa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyorejo sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dibawah naungan Pemerintah Desa Mulyorejo memiliki maksud, tujuan, dan fungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Eksistensi secara administratif diperkuat juga eksistensi secara fungsional dengan berjalannya dua unit bidang usaha BUMDes, yaitu unit usaha peternakan dan pertanian serta unit usaha biro jasa. Secara umum, BUMDes dirancang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif, menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan jasa yang dibutuhkan warga, serta meningkatkan pendapatan asli desa. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih aktif dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan yang di naungi oleh pemerintah desa untuk sarana pengembangan pemberdayaan masyarakat, terutama pada pengembangan pemberdayaan bidang ekonomi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan desa, BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui unit peternakan dan pertanian BUMDes Mulyorejo bersama pemerintah desa membuat aliran air tambahan untuk dialirkan ke lahan pertanian serta pembaruan sistem panen raya satu pintu dengan maksud dan tujuan supaya hasil panen sistem pertanian yang lebih terorganisir dan berdaya saing, pada unit biro jasa BUMDes Mulyorejo menganggarkan unit mobil sewa, penganggaran unit mobil ini adalah sebuah langkah strategis BUMDes bersama pemerintah desa dalam menjawab kebutuhan masyarakat, karena seiring berkembangnya zaman kebutuhan akan alat transportasi menjadi sangat vital, selain

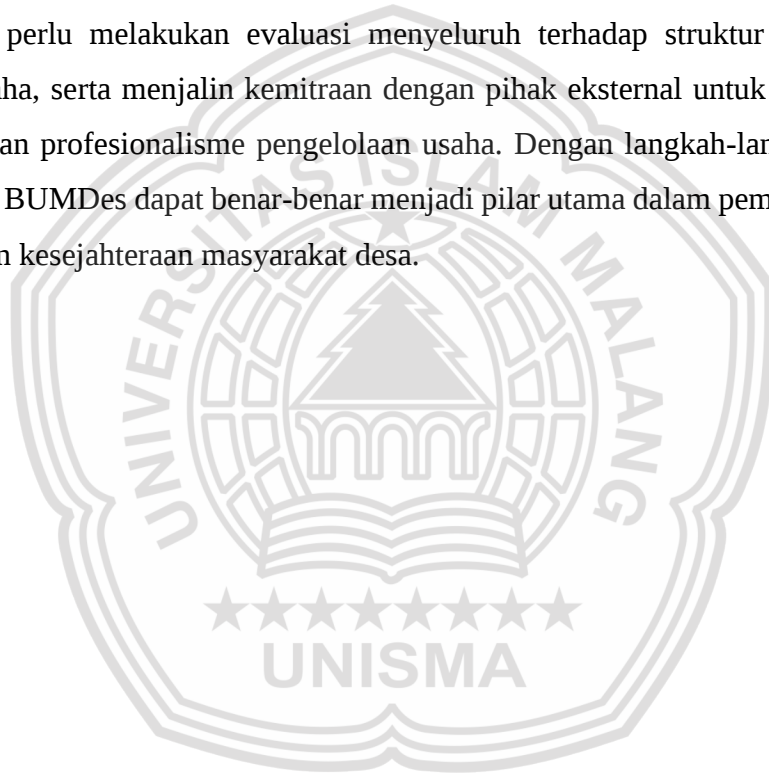
- untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penganggaran unit mobil juga akan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan BUMDes juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi desa, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penerima manfaat.
3. Upaya implementasi kebijakan dan program lembaga BUMDes pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi di Desa Mulyorejo tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut meliputi peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator utama, tingkat literasi dan partisipasi masyarakat, kompetensi pengurus BUMDes, dukungan investor, serta kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19 yang sempat menghambat operasional. Keseluruhan faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana BUMDes dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa dan wadah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan semata, tetapi juga pada komitmen, sinergi, dan adaptasi semua elemen desa terhadap perubahan dan tantangan yang ada.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam analisis peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa saran dapat diberikan oleh peneliti diantaranya.

1. Kepada Pemerintah Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro untuk lebih memaksimalkan peranan mereka kepada masyarakat desa, Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat desa, Pemerintah Desa Mulyorejo diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Optimalisasi peran ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan komunikasi dengan warga, serta pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah desa juga perlu mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan, agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama. Dengan begitu, Pemerintah Desa

- Mulyorejo dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
2. Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu lembaga yang dinaungi oleh pemerintah desa seharusnya mampu berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan potensi lokal yang dimiliki, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui pengelolaan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Namun, hingga saat ini, peran tersebut belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, minimnya inovasi usaha, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Mulyorejo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan, strategi usaha, serta menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Basith., “Ekonomi Kemasyarakatan”, (Malang: UIN-Malik Press,2012).
- Alfian Eikman dan Mala Vinuzia, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4 No. 3, Juli Tahun 2020.
- Ali Imron, “Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim”, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 4.
- Antonio, Pradjasto Hardojo. Mendahulukan Si Miskin, (Yogyakarta: Lkis,2008). hlm 1-3, hlm 14.
- Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi:Sebuah Tinjauan Islam*, Gramedia Press
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Data Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyumas Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah, hlm 1, hlm 2-3, hlm 4
- Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, “Desa di Bojonegoro telah memiliki BUMDes”
- Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “jumlah BUMDes di Jawa Timur”.
- Dias Wulansari, A. dan Yulistiyo, H. (2018). Analisis Dampak Ekonomi Keberadaan Desa Wisata Kemantren Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal.
- Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bumdesa, Desember 2015.
- David Wijaya, BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa), (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hal 98, hlm 141-143
- Eka, Parianti, Fitri Susiani, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, jurnal ilmiah keuangan dan perbankan, vol 2, no 2 November 2019.

- Edi, Suharto., Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat, (Bandung: PT Refikaaditama, 2005). hlm, 30-31
- Febriyanti, Hayati, (2023), Penguatan kelembagaan BUMDes wartime masalah melalui pendampingan tata kelola BUMDes Waru Timur Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, Vol 3 No. 1
- Handiwibowo, Suef, Studi kelayakan BUMDes Ngingas Makmur Abadi Waru-Sidoarjo,(2021), sebagai Teaching Industry dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Jurnal Abdimas Musi Charitas, Vol 5 No 2
- Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: MitraWacana media), hal. 18
- Hikmat, Kusumaningrat., Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2009). hlm 148-149.
- Isbandi Rukminti Adi, KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan), (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 4.
- Mahfirah.,S.M., & Paramita.,A., (2021), *Kajian normatif kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai subyek Hukum*, E-Jurnal Unair, Vol 4(1), Hlm 127
- Miles, dan Huberman, Analisis data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992, hlm 16
- Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Khoiron. “Menejemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dusun Sombar Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang”, Jim Unisma, Vol. 13 No. 5, Tahun 2019
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Namas, Ratih. A, Hardiyono (2023), Integrasi teori dan praktik : Peran Magang MBKM dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Buntorrapo, Journal of Career Development, Vol 3 No. 1
- Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 22.
- Oktaviani, W. F., & Fatchiya, A. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial sebagai Media Promosi Wisata Umbul Pongkok, Kabupaten Klaten. Jurnal Komunikasi Pembangunan
- Pathony,Toni. 2019. Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dikabupaten Subang. Jurnal. Volume 1 (issue 2). Kabupaten Subang

- Prijono dan Pranarka, 1995, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sahya Anggara., “Ilmu Administrasi (Negara, kajian konsep, teori dan fakta dalam menciptakan *Good Governance*)”., Bandung : CV Pustaka Setia 2019., hal 512
- Sandi Wiranata, Slamet Muchsin, Septina Dwi R., “Implementasi program One Village One Product terhadap usaha BUMDes Tumpang Kabupaten Blitar”, *jim Unisma*, Vol.17, No. 10, Tahun 2023
- Sudjito, Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, (Yogyakarta: Psp Ugm, 2012), hlm. 334.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: KajianStrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*.Bandung: PT Refika Adiatma
- Sumaryadi (2005). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Sungkowo Edy Mulyono, *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin*, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Totok dan Poerwoko. 2013. *empowering people (pemberdayaan sumber daya manusia)*. Yogyakarta. Kanisius
- Trina Yuni S., Slamet Muchsin, Roni Pindahanto W., “Implementasi kebijakan pembangunan partisipatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa”, *jim Unisma*, Vol. 12, No.5, Tahun 2020
- Wikipedia.org. *Pemerintah_Desa*, (diunduh tanggal 18 Maret 2020).
- Yogi, Adetya, Fahenda, “Analisis peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”, Tahun 2021
- Yusuf Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru*, cetakan pertama, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2017), Disertasi